BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi bagi masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau kecil dan besar. “Perairan yang terdiri dari sebagian besar laut, sungai dan danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia”.¹ Kemajuan dan kelancaran transportasi sangat berperan sebagai sarana pendorong penyebaran kebutuhan pembangunan hingga ke pelosok tanah air. Jenis transportasi ada tiga, yakni transportasi darat, laut, dan udara. Sebagian besar masyarakat lebih memilih transportasi darat karena dianggap lebih aman, praktis, ekonomis, dan relatif tidak memakan waktu yang lama.

Adapun yang termasuk dalam jenis transportasi darat adalah mobil, sepeda motor, sepeda, bis, angkutan umum, kereta api, dan lain-lain. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang paling banyak kita jumpai di jalan raya. Tidak bisa kita pungkiri bahwa alat transportasi sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama mobil. Mobil merupakan alat transportasi darat yang dapat kita gunakan untuk berangkat bekerja, berangkat ke sekolah, dan berbagai kegiatan lainnya. Pemakai alat transportasi tersebut dari berbagai macam

---

¹ Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h. 7.

golongan, baik dari golongan ekonomi tinggi sampai rendah, maupun dari yang muda sampai yang tua. Dalam pemakaian alat transportasi dalam kehidupan sehari-hari, bagi orang yang memiliki kendaraan sendiri lebih suka memakai kendaraan pribadi dari pada angkutan umum, hal tersebut disebabkan karena kendaraan pribadi dinilai relatif praktis, efisien, dan ekonomis.

Pembinaan lalu lintas jalan, diperlukan penetapan suatu aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi di kota-kota besar adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang semakin meningkat. Perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif. “Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai pemakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas”.²

Disiplin sangat diperlukan di dalam seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya, misalnya dalam hal disiplin berlalu lintas.

---

² Warpani Suwardjoko, *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, PT ITB, Bandung, 2015, h. 135.

Masalah kedisiplinan berlalu-lintas yang buruk merupakan fenomena yang terjadi di kota-kota besar di negara-negara sedang berkembang.

Berkaca dari kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang beraneka ragam seperti itu, tentu saja membutuhkan aturan untuk menciptakan keteraturan, ketertiban, dan menjamin keselamatan masing-masing pengguna jalan. Aturan tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memecahkan masalah seputar lalu lintas dan angkutan jalan. Beberapa tahun yang lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang baru. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menggantikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Peraturan baru ini lebih rinci dan memiliki konsekuensi yang cukup berat bagi para pelanggar dimana sifatnya sama dengan hukuman penjara, yaitu merupakan perampasan kemerdekaan seseorang.

Dalam pengertian sederhana kecelakaan lalu lintas yang dimaksud adalah kejadian dimana sebuah kendaraan bermotor tabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan. Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian manusia. Kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 229 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- 1) Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- 2) Kecelakaan Lalu Lintas sedang; dan
- 3) Kecelakaan Lalu Lintas berat.

Proses evakuasi terhadap korban jiwa yang menjadi korban kecelakaan untuk dibawa ke rumah sakit membutuhkan transportasi yang mendapatkan prioritas utama di lalu lintas dan memiliki hak untuk melanggar peraturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, melawan arah, dan melalui lajur bahu jalan, dan sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang memberi perintah terhadap pengguna jalan, bahwa kendaraan seperti *ambulance* dan kendaraan gawat darurat yang lainnya harus diberikan hak istimewa sebagaimana penjelasan Pasal 134 dan Pasal 135 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 134

Pengguna Jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

- a. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas;
- b. Ambulans yang mengangkut orang sakit;
- c. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada Kecelakaan Lalu Lintas;
- d. Kendaraan pimpinan Lembaga Negara Republik Indonesia;
- e. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara;
- f. Iring-iringan pengantar jenazah; dan
- g. Konvoi dan/atau Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 135

- 1) Kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.
- 2) Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan Rambu Lalu Lintas tidak berlaku bagi Kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134.

Ambulans adalah kendaraan transportasi gawat darurat medis khusus orang sakit atau cedera yang digunakan untuk membawanya dari satu tempat ke tempat

lain guna perawatan lebih lanjut. Istilah ambulans digunakan bagi kendaraan yang membawa peralatan medis kepada pasien di luar rumah sakit atau memindahkan pasien ke rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut. Kendaraan ini dilengkapi dengan *sirene* dan *lightbar* berwarna merah dan biru gawat darurat agar dapat menembus kemacetan lalu lintas, dengan kata lain ambulans adalah salah satu kendaraan yang mendapatkan hak utama untuk didahulukan yang sudah diatur di dalam Pasal 134 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fenomena terbentuknya komunitas pengawalan ambulans secara umum muncul sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi darurat di jalan raya, khususnya ketika ambulans kesulitan menembus kemacetan lalu lintas. Dalam praktiknya, komunitas ini biasanya terdiri dari individu atau kelompok pengendara sepeda motor yang secara sukarela mengawal laju ambulans agar pasien dapat segera mendapatkan penanganan medis. Mereka muncul dari dorongan moral dan solidaritas sosial, melihat bahwa tidak selalu ada petugas kepolisian yang siap mengawal ambulans di setiap waktu dan lokasi. Seperti contoh komunitas tersebut yakni Komunitas *Indonesia Escorting Ambulance* (IEA). “*Indonesia Escorting Ambulance* memberikan bantuan dengan cara mengawal ambulans dan membuka jalan untuk mobil ambulans untuk memecah kepadatan kendaraan yang berada di depan. Namun kenyataannya, *Indonesia Escorting Ambulance* secara tidak langsung ikut melanggar aturan lalu lintas

sehingga ambulans bisa sampai di rumah sakit tanpa insiden”.³

Mengenai kesadaran hukum merupakan fondasi untuk memahami, menghormati, dan mematuhi regulasi-regulasi hukum yang berlaku. Ambulans sebagai kendaraan darurat, mendapatkan pengakuan khusus dalam sistem lalu lintas. Hak istimewa diberikan kepada ambulans untuk memastikan pelayanan medis yang cepat dan efektif kepada mereka yang membutuhkan. Namun, dalam upaya untuk mencapai tujuan ini, sering kali ambulans menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara mendesaknya pelayanan medis dan kewajiban untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Akses pelayanan terhadap kesehatan terlaksana dengan baik, namun terdapat hal-hal yang menjadi kendala saat ambulans mengantar/menjemput pasien terhadap pengguna jalan.

Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans ketika berkendara di jalan raya yakni, menyorobos lampu merah dan jalan demi mempercepat laju kendaraan ambulans, memberikan kode atau meminggirkan kendaraan lain secara tiba-tiba sehingga menimbulkan kemacetan dan menggunakan storobo tanpa seizin pihak kepolisian ataupun dengan ketentuan dan syarat lalu lintas. Pelanggaran-pelanggaran tersebut, kemungkinan besar dilakukan oleh komunitas pengawal ambulans, sebenarnya merupakan pelanggaran lalu lintas. Dalam konteks ini, penegakan hukum diperlukan untuk mencegahnya. Ini sesuai dengan Pasal 104 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

---

³ Nurhadi, *Mengenal Indonesia Escorting Ambulance, Pengawal Kendaraan Prioritas Ambulans*, diakses melalui: <https://otomotif.tempo.co/read/1545464/mengenai-indonesia-escorting-ambulance-pengawal-kendaraan-prioritas-ambulans>, diakses pada tanggal 24 Desember 2024.

yang menyatakan bahwa setiap individu yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib mematuhi peraturan rambu lalu lintas atau tanda larangan serta tanda marka jalan.

Fakta ini menggambarkan pertentangan antara tujuan penyelamatan nyawa dan aturan hukum yang mengatur lalu lintas. Dalam banyak kasus, komunitas pengawal ambulans menggunakan hak istimewa mereka untuk melintasi jalanan tanpa hambatan, bahkan jika itu berarti melanggar aturan seperti lampu merah atau batasan kecepatan. Hal ini memicu pertanyaan fundamental tentang sejauh mana hak istimewa ini dapat diperluas dalam kepentingan memberikan pertolongan medis yang cepat. Berdasarkan penjelasan tersebut memunculkan berbagai pertanyaan ditengah masyarakat mengenai bagaimana tindakan komunitas pengawal ambulans yang melanggar lalu lintas harus ditafsirkan dari perspektif hukum atau apakah tindakan komunitas pengawal ambulans yang melanggar lalu lintas dapat dianggap sebagai keputusan yang bijak atau justru sebagai pelanggaran terhadap aturan yang ada.

Seperti contoh kasus yang diberitakan oleh Media cetak Tagar.id menerbitkan bahwa Polisi mengeluarkan surat tilang kepada seorang pengemudi yang sedang mengiringi dan mengawal ambulans karena diyakini tindakannya membahayakan dirinya dan pengemudi lainnya. Namun, pengemudi mengklaim bahwa dia melakukannya karena begitu banyak pengemudi lain yang tidak menyadari betapa pentingnya ambulans prioritas dan oleh karena itu cenderung

bertindak dengan cara yang berisiko.⁴

Praktisi keselamatan berkendara yang juga founder dan instruktur Jakarta *Defensive Driving Consulting* (JDDC) “Jusri Pulubuhu mengatakan, komunitas pengawal ambulans ini sebenarnya punya peran yang sangat mulia. Dia bilang, munculnya relawan pengawal ambulans ini karena masih banyak pengguna jalan yang tidak paham dengan kendaraan prioritas seperti ambulans”.⁵

Menurut Jusri, fenomena pengendara sipil yang melakukan pengawalan terhadap ambulans itu dari sisi hukum adalah hal yang salah. Karena hal itu bertentangan dengan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Pasal itu disebutkan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirine.⁶

Mereka (relawan pengawal ambulans) melakukan satu hal yang sangat membahayakan dan melanggar aturan. Karena tindakan mereka tidak aman sama sekali. Karena masyarakat pengguna jalan lain tahu mereka bukan penegak hukum. Penegak hukum saja kadang-kadang mereka nggak kasih jalan. Kedua, mereka (relawan pengawal ambulans) tidak terlatih dengan hal-hal yang sifatnya dilakukan oleh penegak hukum dalam hal ini polisi dalam hal pengawalan. Itu kan ada SOP yang harus dipahami oleh mereka seperti hand signal, menyalip, kemampuan pengkajian terhadap risiko dan sebagainya. Dari sisi norma mereka tidak tahu dengan norma-norma keselamatan yang dimiliki oleh para petugas, ujar Jusri.⁷

Lanjut dia, pengawal ambulans ini juga dianggap melanggar aturan hukum. Menurutnya, sesuai Undang-Undang yang berhak melakukan pengawalan dan memiliki hak diskresi terhadap rekayasa lalu lintas hanya petugas polisi. Sehingga mereka bisa melakukan sesuatu yang kadang-kadang dianggap masyarakat bertentangan dengan hukum. Misalnya menyetop kendaraan-kendaraan lain, atau bahkan melakukan *contra flow*. Bahkan tidak ada instansi lain kecuali polisi yang memiliki hak diskresi.⁸

---

⁴ R. Antares. P., *Viral Pengendara Motor Kawal Ambulans Ditilang Polisi*, diakses melalui: <https://www.tagar.id/viral-pengendara-motor-kawal-ambulans-ditilang-polisi>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

⁵ Tim Deticom, *Pemotor Kawal Ambulans Tewas Kecelakaan, Ini Pelajaran Pentingnya*, diakses melalui: <https://oto.detik.com/berita/d-5886472/pemotor-kawal-ambulans-tewas-kecelakaan-ini-pelajaran-pentingnya>, diakses pada tanggal 25 Mei 2025.

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dalam konteks ini, analisis yuridis muncul sebagai alat penting dalam memahami implikasi hukum dari tindakan komunitas pengawalan ambulans yang melanggar lalu lintas. Dalam penelitian ini, akan menggali lebih dalam, meresapi sejarah, hukum, dan implikasi dari interaksi ini. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran komunitas pengawal ambulans dalam lalu lintas dan kajian terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dalam penelitian ini akan mencoba mengurai permasalahan dari dilema ini. Akan menjelajahi hukum yang berlaku, mengkaji perspektif etika, dan mendalami dampak yang mungkin timbul dari tindakan mereka. Pengertian peraturan hukum sebagai penyelenggaraan hukum oleh pemerintah atau petugas penegak hukum yang mempunyai kepentingan atau kewenangan yang diberikan oleh aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka topik ini menarik dan mendorong penulis untuk mengadakan sebuah penelitian dalam penulisan skripsi yang berjudul: Pertanggungjawaban Komunitas Pengawal Ambulans Terhadap Pelanggaran Dalam Pengawalan Ambulans Di Jalan Raya.

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana kedudukan komunitas pengawal ambulans dalam pengawalan ambulans menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

2. Bagaimana pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan komunitas pengawal ambulans dalam pengawalan ambulans menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum pidana mengenai pengaturan hukum terkait hak pertanggungjawaban dalam kecelakaan lalu lintas yang menggunakan jasa ambulans di Indonesia.
2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai bentuk pertanggungjawaban pengguna ambulans yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas sehingga mengakibatkan kerugian kepada orang lain di Indonesia.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pelanggaran Lalu Lintas; b) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c) Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

1.5.1.1. Pelanggaran Lalu Lintas

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pelanggaran perbuatan (perkara) melanggar, suatu tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan”.⁹ Dengan begitu bahwa pelanggaran bisa dikenai atau di jatuhkan sanksi melihat pelanggaran merupakan perbuatan melanggar hukum yang bisa di klasifikasikan suatu tindak pidana tetapi tingkatannya lebih rendah dari pada kejahatan yang dapat dikenai hukuman pidana yang berat. penjelasan atau definisi pelanggaran menurut para ahli, pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum apabila dapat baru di ketahui terdapat Undang-Undang yang menentukan demikian. Sehingga pelanggaran mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

---

⁹ KBBI Kemendikbud, *Pelanggaran*, diakses melalui: <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pelanggaran> diakses pada tanggal 4 Desember 2024.

yang berlaku. Tidak bisa dikatakan pelanggaran apabila tidak ada aturan yang mengaturnya. tidak bisa dijatuhi sanksi melakukan pelanggaran kepada seseorang apabila tidak ada aturan yang mengaturnya.

Delik hukum adalah perbuatan yang oleh Undang-Undang dianggap merugikan ketertiban umum, sedangkan pelanggaran adalah delik Undang-Undang bukan delik hukum. Pelanggaran adalah kejadian dimana kepentingan mereka secara jelas ditentukan oleh hukum. Dianggap melanggar ketertiban hukum disini masuk klasifikasi perbuatan pelanggaran, ketertiban umum ini mengerucut terhadap keteriban dalam berlalu lintas seperti yang hendak penulis fokuskan.

1.5.1.2. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengolahanya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang diruang lalu lintas. Angkutan jalan adalah perpindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan diruang lalu lintas.

Lalu Lintas adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan dijalan. Selanjutnya menurut "W.J.S Poerwadarminta, pengertian Lalu lintas yaitu: Lalu Lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik, perihal perjalanan, serta

perihal perhubungan antara satu tempat dengan tempat lainya (dengan jalan pelayaran, angkutan udara, darat, dan sebagainya)”¹⁰

Lalu lintas (*Traffic*) diartikan “*pederstrians, riddin, or herded animals, vehicles strescass and other conveyences either singly to together while using any highway for porposes of trafe*” (perjalanan kaki, hewan yang ditunggangi atau digiring, kendaraan, trem, dan lain-lain alat angkut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang menggunakan jalan untuk tujuanya.¹¹

Dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud lalu lintas adalah hubungan antar manusia dengan ataupun tanpa disertai alat penggerak dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan jalan sebagai ruang geraknya.

Lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (*Stakeholders*) sebagai berikut:

- a. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementrian yang bertanggungjawab di bidang jalan;
- b. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementrian yang bertanggung jawab dibidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;

---

¹⁰ W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PT Balai Pustaka, Jakarta, 2015, h. 37.

¹¹ *Ibid.*

- c. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggungjawab dibidang industri;
- d. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab dibidang teknologi; dan
- e. Urusan pemerintahan dibidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas serta pendidikan berlalu lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.5.1.3. Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas

Perlindungan korban lebih banyak bersifat perlindungan abstrak atau perlindungan tidak langsung. “Artinya dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini berarti pada hakikatnya telah ada perlindungan yang secara tidak langsung berkaitan dengan kepentingan hukum dan hak asasi korban”.¹²

Pengertian Perlindungan menurut Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

---

¹² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 3.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diatur berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kejahatan secara individu, dengan tetap melakukan pembinaan kepada pelaku kejahatan. Perlindungan korban dalam konteks ini berarti tetap menempatkan kepentingan korban sebagai salah satu bagian mutlak yang dipertimbangkan dalam proses penyelesaian perkara pidana seperti korban memungkinkan untuk mengontrol suatu perkara yang menempatkan dirinya sebagai korban yaitu dapat melakukan upaya pra peradilan, jika suatu perkara dihentikan penyidikan atau penuntutannya.

Hal tersebut merupakan salah satu bentuk perlindungan karena diberikannya hak kontrol ini dapat memberi jaminan bahwa perkara pidana dimaksud dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Lebih jauh lagi, selain itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga memberi peluang kepada korban untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabungkan dengan perkara pidana bersangkutan sebagaimana ketentuan Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan, meliputi:

- a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku

atau pihak lainnya, seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;

- b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
- c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
- e. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
- f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
- g. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
- h. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban; dan
- i. Hak atas kebebasan pribadi atau kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Landasan yuridis dalam penelitian ini berkaitan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.

Pengaturan tata tertib berlalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan. Yang kemudian diteruskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993

tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Pengemudi kemudian disempurnakan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau dapat disebut dengan UULLAJ.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan yang terakhir dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Peraturan mengenai Lalu Lintas juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas

Penggunaan jasa *ambulance* di Indonesia memiliki landasan yuridis yang mengatur bagaimana layanan ini beroperasi, termasuk peran, tanggung jawab, dan regulasi yang harus dipatuhi oleh penyedia layanan. Berikut adalah beberapa landasan yuridis yang relevan, diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa Menjamin hak setiap orang untuk memperoleh layanan kesehatan dan pelayanan publik dan dalam Pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan umum yang layak;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana transportasi kesehatan, termasuk *ambulance*, sebagai bagian dari pelayanan kesehatan, dan Pasal 190 menjelaskan bahwa Pelanggaran dalam penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dapat dikenakan sanksi administrasi atau pidana;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 134 menjelaskan bahwa *Ambulance* termasuk dalam prioritas utama kendaraan yang berhak mendapatkan prioritas di jalan raya, dan dalam Pasal 135 menyatakan bahwa: Mengatur tata cara penggunaan prioritas jalan bagi kendaraan khusus seperti ambulans;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat mengatur penyediaan layanan ambulans sebagai bagian dari tanggung jawab Puskesmas dalam memberikan pelayanan rujukan dan kedaruratan medis;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) mengatur

penyediaan layanan *ambulance* sebagai bagian dari sistem rujukan gawat darurat di Indonesia, serta mengatur standar operasional *ambulance*, termasuk kelengkapan, personel, dan prosedur; dan

6. Kode Etik dan Standar Operasional yakni standar pelayanan *ambulance* diatur sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditetapkan Kementerian Kesehatan, serta penyedia layanan *ambulance* harus memenuhi persyaratan teknis dan operasional, termasuk tenaga kesehatan yang terlatih dan peralatan medis yang sesuai.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Adapun landasan teori dalam penelitian ini merupakan teori pertanggungjawaban hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. “Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan”.¹³ “Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi

---

¹³ Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, h. 15.

seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk member pertanggungjawabannya”¹⁴

Ada 2 (dua) istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban, yaitu: *liability (the state of being liable)* dan *responsibility (the state or fact being responsible)*.

- 1) *Liability* merupakan istilah hukum yang luas (*a board legal term*), yang di dalamnya antara lain mengandung makna bahwa *liability* menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Disamping itu, *liability* juga merupakan; kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial; kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau beban; kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan Undang-Undang dengan segera atau pada masa yang akan datang; dan
- 2) *Responsibility* berarti (hal dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan). *Responsibility* juga berarti, kewajiban bertanggung jawab atas Undang-Undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkannya).¹⁵

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁶

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intertional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian;
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort lilability*), didasarkan pada konsep

---

¹⁴ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, h. 48.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, h. 318.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, h. 503.

kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*); dan

- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Tanggung jawab dalam arti *responsibility* juga diartikan sebagai sikap moral untuk melaksanakan kewajibannya, sedang tanggung jawab dalam arti *liability* adalah sikap hukum untuk mempertanggungjawabkan pelanggaran atas kewajibannya atau pelanggaran atas hak pihak lainnya. Menurut Hans Kelsen teori tanggung jawab berdasarkan buku teori hukum murni dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :¹⁷

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seseorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian; dan
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Nanda Dimas Mukholiq
	Sumber	Skripsi Program Studi S1 Hukum Fakultas Ilmu Sosial

¹⁷ Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, h. 140.

		Dan Ilmu Politik Universitas Tidar 2023
	Judul	Tinjauan Yuridis Pelanggaran Pengawasan Indonesia <i>Escorting Ambulance</i> (Kajian Terhadap Pasal 135 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan)
	Perbedaan	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban kepolisian dengan adanya Indonesia <i>Escorting Ambulance</i> sesuai dengan Pasal 135 UULLAJ masih belum efektif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain. Hukumnya sendiri, penegak hukum, sarana prasarana yang mendukung penegak hukum, dan masyarakat. Indonesia <i>Escorting Ambulance</i> memerlukan izin hukum dan SOP untuk melakukan pengawasan <i>ambulance</i> . Sanksi Pasal 287 ayat (1) dan ayat (2) UULLAJ dalam pengawasan yang dilakukan oleh Indonesia <i>Escorting Ambulance</i> yang bergerak dibidang sosial kemasyarakatan. Untuk mengawal ambulans Indonesia <i>Escorting Ambulance</i> harus memiliki otorisasi hukum dan SOP yang sesuai.
2	Nama	Andika Bachtiar
	Sumber	Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarifhidayatullah Jakarta 2018
	Judul	Pertanggungjawaban Pidana Atas Kelalaian Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus/2016/PT. PAL)
	Perbedaan	Hasil penelitian bahwa sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa atas nama Adi Irawan dalam perbuatannya melakukan kelalaian dalam menggunakan sepeda motornya di lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia didasarkan pada Pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu menganggap kualifikasinya telah terpenuhi sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara satu tahun enam bulan penjara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan dan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani. Demikian ini yang

		mnejadi sanksi yang dijatuhkan terdakwa ditinjau dari hukum pidana positif. Ditinjau dari hukum pidana islam, terdakwa Adi Irawan digolongkan sebagai pelaku pembunuhan karena kesalahan karena tidak ada niat sama sekali pelaku untuk melakukan pembunuhan. Sanksi bagi pelaku pembunuhan karena kelalaian yaitu diat mukhaffafah dengan 100 ekor unta dan kafarat dengan cara memerdekakan hamba sahaya atau berpuasa selama dua bulan berturut-turut yang kedua pelaksanaan hukuman tersebut dibebankan kepada aqilah.

Adapun yang menjadi perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini mengangkat judul penelitian mengenai pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya. Dengan membahas dua rumusan masalah yakni mengenai 1) Bagaimana kedudukan komunitas pengawal ambulans dalam pengawalan ambulans menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan 2) Bagaimana pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya. Dalam penelitian penulis diulas secara umum mengenai komunitas pengawal ambulans sedangkan dalam penelitian yang lain membahas mengenai salah satu jenis komunitas pengawal ambulans yakni *Indonesia Escorting Ambulance (IEA)*.

Sedangkan yang menjadi persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang kecelakaan lalu lintas yang melibatkan komunitas pengawalan ambulans. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan terkait bagaimana kedudukan komunitas pengawal ambulans dalam pengawalan ambulans menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta bagaimana pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.¹⁸

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai

---

¹⁸ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 (tiga) metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya. Dalam penelitian ini membahas beberapa konsep yang telah diuraikan diantaranya: a) Pelanggaran Lalu Lintas; b) Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan c) Perlindungan Korban Kecelakaan Lalu Lintas.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara

menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia; dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*).

Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami oleh peneliti adalah *Ratio decidenci*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada keputusan. Dalam penelitian ini penulis mengkaji terkait kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan komunitas pengawalan ambulans sebagaimana diuraikan dalam latar belakang penelitian ini.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan ini untuk menjawab isu hukum dalam penelitian. Adapun bahan hukum dalam penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
- d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- e) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- f) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- g) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; dan
- h) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang pertanggungjawaban komunitas pengawal ambulans terhadap pelanggaran dalam pengawalan ambulans di jalan raya dianalisis berdasarkan aturan hukum yang berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Kajian Pustaka yang terdiri dari Landasan Teori dan Penjelasan Konsep, Metode Penelitian terdiri atas Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum, Analisis Bahan Hukum, dan diakhiri dengan Pertanggung Jawaban Sistematika.

Bab II membahas tentang Kedudukan Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawasan Ambulans Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Dengan sub bab diantaranya: Komunitas; Komunitas Pengawasan Ambulans; Kendaraan Yang Diutamakan Menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pengawasan Ambulans; dan Kedudukan Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawasan Ambulans Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Bab III membahas tentang Pertanggungjawaban Komunitas Pengawal Ambulans Terhadap Pelanggaran Dalam Pengawasan Ambulans Di Jalan Raya. Dengan sub bab diantaranya: Pertanggungjawaban Hukum; Pertanggungjawaban Perdata Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawasan Ambulans; Pertanggungjawaban Pidana Komunitas Pengawal Ambulans Dalam Pengawasan Ambulans; dan Pertanggungjawaban Komunitas Pengawal Ambulans Terhadap Pelanggaran Dalam Pengawasan Ambulans di Jalan Raya.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.